

DAFTAR INFORMASI PUBLIK LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN



DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN
KEMENTERIAN KEHUTANAN
2014

Mengetahui,

.....
.....

Tanda Tangan & Nama Jelas



DASAR HUKUM

1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
3. PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
4. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P. 7/MENHUT-II/2011 TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN
5. KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : SK.50/MENHUT-II/2011 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN
6. KEPUTUSAN KEPALA PUSAT HUBUNGAN MASYARAKAT KEMENTERIAN KEHUTANAN SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA KEMENTERIAN KEHUTANAN NOMOR : 38/PHM-2/2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN



Daftar
Informasi
Setiap Saat

Hutan Alam

1. Mekanisme Pemberian dan Perluasan Areal Kerja IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK-HT pada Hutan Produksi (bagan alir)
2. Mekanisme Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) (bagan alir)
3. Rekapitulasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA)
4. Rekapitulasi SK Izin Baru IUPHHK-HA
5. Rekapitulasi Penolakan Permohonan Izin Baru IUPHHK-HA
6. Rekapitulasi IUPHHK-HA yang memperoleh sertifikat PHPL
7. Rekapitulasi IUPHHK-HA yang memperoleh sertifikat VLK
8. Rekapitulasi Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) berbasis IHMB (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2014 tanggal 22 Mei 2014).
9. Rekapitulasi Produksi Kayu Bulat Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 14/Menhut-II/2011 *jo.* Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 20/Menhut-II/2013 tentang Izin Pemanfaatan Kayu
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :

P. 31/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem, atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 38/Menhut-II/2009 *jis*. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 42/Menhut-II/2013 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 9/Menhut-II/2010 jo P.30/Menhut-II/2010 tentang Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor

Hutan Tanaman

14. Rekapitulasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)
15. Rekapitulasi SK Izin Baru IUPHHK-HTI
16. Rekapitulasi Penolakan Permohonan Izin Baru IUPHHK-HTI
17. Rekapitulasi IUPHHK-HT yang memperoleh sertifikat PHPL
18. Rekapitulasi Realisasi Penanaman dan Produksi IUPHHK-HTI
19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 70/Kpts-II/1995 *jis* Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 246/Kpts-II/1996 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 21/Menhut-II/2006 tentang Pengaturan Tata Ruang Tanaman Industri
20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 62/Menhut-II/2008 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Menteri Kehutanan Nomor : P. 19/Menhut-II/2012 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat

21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 3/Menhut-II/2008 tentang Deliniasi Areal Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman
22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 55/Menhut-II/2011 *jo*. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 31/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman

Restorasi Ekosistem /Jasa Lingkungan

23. Rekapitulasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE)
24. Rekapitulasi Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi (IPUJL-HP)
25. Rekapitulasi Pengesahan Rencana Kerja Usaha (10 Tahun) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE)
26. Rekapitulasi Penolakan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE)
27. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 31/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi

Ekosistem, atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi

28. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 36/Menhut-II/2009 *jo*. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 11/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung

Penatausahaan Hasil Hutan

29. Rekapitulasi GANIS dan WASGANIS PHPL
30. Rekapitulasi Unit Manajemen IUPHHK-HA Pelaksana SI-PUHH *Online*
31. Rekapitulasi Distribusi Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB)

Industri Hasil Hutan

32. Rekapitulasi Data Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Kapasitas Produksi di Atas 6.000 m³/tahun per Provinsi
33. Rencana dan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Nasional per Provinsi per Tahun IPHHK Kapasitas Produksi di Atas 6.000 m³/tahun
34. Rekapitulasi IPHHK yang Telah Memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu
35. Data Ekspor Produk Industri Kehutanan Menggunakan Dokumen V-Legal

Daftar Informasi Publik ini dapat diakses di website PPID : www.ppid.dephut.go.id